

MENGGUGAT PERAN AKADEMISI DALAM MEMPERBAIKI KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT

Adi Sulistiyono

Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

"Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain."

(B.J. Habibie)

Abstrak

Tulisan mencoba melakukan elaboratif reflektif mengenai gugatan terhadap peran akademisi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Peran akademisi, sebagai sosok yang dianggap netral dan begawan yang mampu mendorong perubahan substantif, senantiasa akan dipertanyakan disebabkan adanya struktur baru dalam masyarakat karena dirangsang konteks baru, pergulatan baru yang pada gilirannya dirangsang atau malah merangsang pandangan baru dan membawa soal baru lagi bagi yang memerlukan jawaban baru. Karena itu, peran ideal itu merupakan hasil kolektif bersama masyarakat tempat sang cendekiawan berada. Ketika akademisi, yang diidentifikasi sebagai intelektual kampus, maka aktualisasi peran secara umum dapat dipahami sebagai sebuah proyek pendewasaan sosial manusia menuju upaya ideal terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) atau sebagai sebuah proses menuju tercapainya humanisme universal. Secara internal, bagi akademisi, kemampuan untuk "the cognitive openness and the structural openness of business" bagi dirinya merupakan sesuatu yang penting untuk melanggengkan dirinya dalam riuh kehidupan masyarakat.

PENDAHULUAN

Tulisan mencoba melakukan elaboratif reflektif mengenai gugatan terhadap peran akademisi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Peran akademisi, sebagai sosok yang dianggap netral dan begawan yang mampu mendorong perubahan substantif, senantiasa akan dipertanyakan disebabkan adanya struktur baru dalam masyarakat karena dirangsang konteks baru, pergulatan baru yang pada gilirannya dirangsang atau malah merangsang pandangan baru dan membawa soal baru

lagi bagi yang memerlukan jawaban baru.¹

Karena itu, peran ideal itu merupakan hasil kolektif bersama masyarakat tempat sang cendekiawan berada.² Ketika akademisi, yang diidentifikasi sebagai kalangan kampus, maka aktualisasi peran secara umum dapat dipahami sebagai sebuah proyek pendewasaan sosial manusia menuju upaya ideal

¹ Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, trans. oleh Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 11. Baca juga Neil Postman, *The End Of Education*, trans. oleh Siti Farida (Yogyakarta: Jendela, 2009), hlm. 165-166.

² Graham Francis Badley, "Why and How Academics Write," *Qualitative Inquiry*, 2018, <https://doi.org/10.1177/1077800418810722>.

terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) atau sebagai sebuah proses menuju tercapainya humanisme universal.³ Secara internal, bagi akademisi, kemampuan untuk “*the cognitive openness and the structural openness of business*” bagi dirinya merupakan sesuatu yang penting untuk melanggengkan dirinya dalam riuh kehidupan masyarakat.⁴ Diakui luas, bahwa peran akademisi dalam menerangi “*policy formation*” merupakan sebuah gejala yang penting dalam masyarakat yang dinamis.⁵

Berbagai pilihan bisa dibuat bila terkandung maksud untuk meneliti dan menulis tentang kaum akademisi. Karakter, peran, sumbangan, latar belakang, basis sosial-ekonomi-politik mereka bisa dijadikan bahan untuk diteliti. Itulah yang selama ini dikerjakan tentang akademisi Indonesia. Walaupun “definisi diri” mengenai akademisi banyak sekali jumlahnya, namun semua hanya menunjukkan adanya subyektivisme epistemologis sambil diiringi oleh eksklusivisme meta-epistemologis.⁶ Di Indonesia dalam setiap episode gerakan yang berimplikasi pada perubahan sosial

politik, senantiasa mendudukkan akademisi terutama mahasiswa dalam jajaran termuda kalangan cendekiawan, sebagai pemeran utama.⁷

Pembicaraan mengenai kontekstualisasi peran akademisi menjadi penting mengingat kondisi Indonesia dewasa ini. Berbagai masalah nasional yang dihadapi begitu kompleks dan tidak kunjung selesai. Misalnya aspek politik, di mana masalahnya mencakup kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, kelembagaan negara yang tidak efektif, sistem kepartaian yang tidak mendukung, dan berkembangnya pragmatism politik. Lalu aspek ekonomi, masalahnya meliputi paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi dualistik, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak, dan kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. Dan aspek sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial, dan melemahnya mentalitas positif.⁸

Akademisi-Pertarungan Simbolik

Kata akademisi, atau “cendekiawan” dalam al-Quran dikenal dengan istilah *ulul albab*, yang merupakan perwujudan aktifitas akal dan hati. Kepribadian *ulul al-bab* menempati posisi penting dan terhormat dalam al-Quran dan hanya layak bagi seorang yang berilmu dan berhikmah, sebagaimana dalam

³ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 17-18. Baca juga Muh. Khanif Dhakiri, *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan* (Jakarta: Pena, 2008), hlm. 3.

⁴ Mustapha Belkhouja dan Hyungseok (David) Yoon, “How does openness influence the impact of a scholar’s research? An analysis of business scholars’ citations over their careers,” *Research Policy* 47, no. 10 (2018): 2037–47.

⁵ Patsy Healey, “Knowledge Flows, Spatial Strategy Making, and the Roles of Academics,” *Environment and Planning C: Government and Policy* 26, no. 5 (2008): 861–881.

⁶ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. xxiv.

⁷ Imam Moedjiono, “Cendekawan dan Kebebasan Akademik,” *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah* 5 (1999): 67–78.

⁸ Inanna, “Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 27–33.

firman Allah SWT : “Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS Yusuf [12]: 22). Dalam *Mu’jam Mufahras li Alfadz al Quran* disebutkan bahwa kata *ulul albab* berulang sebanyak 16 kali dalam 10 surah dengan konteks yang berbeda-beda. Kata *ulul albab* diterjemahkan dengan “orang yang berakal”, artinya orang yang mampu mengambil kesimpulan, pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat qauliyah yang terdapat dalam al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam raya. *Ulul albab* adalah orang yang memiliki sikap keilmuan dengan melakukan secara teratur upaya-upaya pengamatan, penelitian, pengakajian dan penafsiran terhadap gejala-gejala alam. Dari kajian itu akan muncul kesadaran yang dalam akan kebesaran Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu keseimbangan fikir dan zikir.⁹

Menurut Harsja W. Bahtiar, akademisi, yang disebut dengan kaum intelektual, merupakan orang-orang yang menjalankan peranan tertentu dalam masyarakat, peranan yang meliputi tindakan-tindakan yang lebih ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan budaya daripada pertimbangan-pertimbangan sosial. Mereka senantiasa memusatkan perhatian pada usaha mempelajari, menafsirkan, mempertahankan, mengembangkan dan menyajikan pola-

pola yang diwujudkan oleh sistem budaya masyarakat mereka.¹⁰

Kemampuan akademisi dalam merespon “kesimpulan, pelajaran, dan peringatan” di atas amat terkait dengan kebangkitan humanisme. Dalam perspektif *historical scientific* (sejarah pengetahuan), humanisme merupakan salah satu cabang etika yang cikal bakalnya lahir pada awal abad XVI, berbarengan dengan lahirnya reformasi.¹¹ Kebangkitan humanisme yang paling awal ditandai dengan lahirnya gagasan mengenai kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri.¹² Tak pelak, gagasan humanisme sering diidentikkan sebagai wajah pendidikan tinggi tempat asal muasal akademisi. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), PT merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tata nilai ini, ada kemungkinan sebuah universitas masih belum mempunyai *shared-value* yang berfokus pada pengembangan ilmu, sehingga gagal mempunyai dasar kuat dalam memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Logika berpikir sederhana dapat menangkap arti ini. Ketika sebuah universitas tidak

⁹ Juju Saepudin, “Revitalisasi Peran ICMI pada Era Reformasi,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 1 (2016): 189–202.

¹⁰ Harsja W. Bahtiar, “Kaum Cendekiawan di Indonesia: Suatu Sketsa Sosiologi,” dalam *Cendekiawan dan Politik*, ed. oleh Wiratmo Soekito (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 79.

¹¹ German Ulises Bula dan Sebastián Alejandro González, “Academia and the World Brain,” *Kybernetes* 47, no. 9 (2018): 1821–35.

¹² Abu Hatsin, (*Kata Pengantar*), *Islam Humanisme; Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. v.

mempunyai nilai-nilai kuat yang terkait dengan berbagai hal di atas, maka fungsi pelayanan dan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat turun kinerjanya.¹³

Perguruan tinggi merupakan sebuah pihak yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan kebijakan. Jikalau masuk dalam kajian kebijakan publik, maka perguruan tinggi dapat dimasukkan ke dalam *epistemic community*.¹⁴ Perguruan tinggi memiliki para profesional yang memiliki kajian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan.¹⁵ Namun, prasyarat utama untuk bertindak sebagai profesional di atas bagi seorang akademisi adalah apa yang disebut Soejatmoko sebagai “otonomi.” Dalam hal ini, otonomi dimaksudkan sebagai “kemampuan suatu sistem untuk berdiri sendiri dan lengkap dalam dirinya sendiri.” Dengan demikian, otonomi menjadi titik tolak, *terminus a quo*, dan sekaligus menjadi titik tuju, *terminus ad quem*, untuk mempersoalkan banyak hal termasuk pembangunan, tradisi, agama, dan apapun yang lain.¹⁶

Prasyarat itu perlu digarisbawahi karena pada akhirnya seorang akademisi akan terlibat dalam pertarungan simbolik (*symbolic struggles*) baik secara individual maupun kolektif. Karena itu menjadi seorang akademisi bukan hasil dari propaganda sengaja dan terarah atau pemaksaan simbolik.¹⁷ Ijazah, misalnya, tidak dengan sendirinya menciptakan reputasi dan dengan demikian menjadikan seseorang akademisi, betapapun tinggi kredensial yang diberikan. *Doctrina et erudition* menjadi kapital simbolik yang sudah berarti pengakuan yang langsung menjadi kapital. Namun di pihak lain, ijazah tidak dengan sendirinya dikeluarkan dari peta pertarungan kekuasaan simbolik tersebut darimana kecendekiawanan itu dirumuskan. Dengan demikian obyektivisme di sini menjadi sesuatu yang secara struktural memberikan pengaruh yang tidak kecil.¹⁸

Kalangan akademisi sendiri tidak bisa dikatakan sebagai “komunitas imajiner” terutama karena mereka menempati suatu medan politik.¹⁹ Akademisi, dengan wacana kecendekiawanan yang dimiliki, bisa mengukir politik seperti tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang paling ditakuti Belanda pada zaman kolonial dulu bukan senjata api akan tetapi jalan pikiran seperti “*Als ik eens Nederlander was*”, seperti yang dikemukakan oleh Soewardi Soeryaningrat yang kelak

¹³ Soni Akhmad Nulhaqim dkk., “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015,” *Social Work Jurnal* 6, no. 2 (2013): 154–272.

¹⁴ Peter M. Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” *International Organization* 46, no. 1 (1992): 1–35.

¹⁵ Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Rezim* (Jakarta: Grasindo, 2002).

¹⁶ Ignas Kleden, “Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan,” dalam *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984).

¹⁷ Pierre Bourdieu, *In the Other Word, Essays Toward a Reflective Society* (London: Polity Press, 1990), hlm. 127.

¹⁸ Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

menjadi Ki Hajar Dewantara, pendiri sistem persekolahan Taman Siswa.²⁰

Kekuasaan-Banalitas Intelektual

Sejarah telah menunjukkan, membicarakan tentang peran akademisi di Indonesia sungguh menarik, mengingat di negeri ini posisi intelektual sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno, akademisi di Indonesia memiliki kedudukan istimewa. Lebih lanjut Franz Magnis, membandingkan bagaimana posisi akademisi di Indonesia dengan yang ada di Eropa. Di Jerman misalnya, tidak mungkin komentar seorang akademisi akan menghiasi *headline* koran-koran di sana semacam *The Herald Tribune*. Tidak mungkin koran di sana mau mengangkat pendapat seorang akademisi seperti Jurgen Habermas, Jean-Francois Lyotard atau akademisi lainnya. Tetapi di Indonesia pendapat seorang akademisi yang tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun, barangkali dia hanya dosen di sebuah perguruan tinggi, dapat menjadi *headline* di halaman pertama. Begitu halnya masyarakat di Eropa lebih antusias menyimak paparan dan analisis dari wakil pemerintahan yang berkuasa, dibanding dengan analisis para akademisi. Tetapi sebaliknya di Indonesia justru orang sangat tertarik dengan analisis para akademisi dibandingkan pejabat.²¹

Oleh karena itu, jelas sekali keterkaitan para akademisi ini turut

memainkan peranan dalam panggung politik. Persoalannya kemudian adalah apakah para akademisi ini nantinya bisa mengemban misi intelektualnya yang luhur menyelamatkan manusia (*the salvation of man*) apa justru sebaliknya seperti apa yang disinyalir oleh Daniel Dhakidae, bahwa kelompok akademisi dalam Orde Baru menjadi alat produksi kebenaran yang berfungsi melestarikan kekuasaan sang rezim.²² Atau malah seperti gagasan Julien Benda yang disebutnya dengan *La Trahison des Clercs* yaitu sebuah renungan tentang pengkhianatan kaum cendekiawan.²³

Bahkan sebaliknya peran akademisi di sini seperti apa yang dikatakan oleh Antonio Gramsci disebut sebagai intelektual organik. Yang dimaksud intelektual organik dalam pandangan Gramsci adalah kalangan yang berhubungan angung dengan kelas atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan mereka untuk berbagi kepentingan, serta untuk memperbesar kekuasaan dan kontrol. Dengan kata lain intelektual organik yaitu seseorang dalam masyarakat demokratis yang mencoba mendapatkan pengakuan dari pelanggan potensial, mendapatkan dukungan, menggaet konsumen atau suara pemilih. Sehingga mereka senantiasa berupaya mengubah pikiran dan memperluas pasar.²⁴ Dalam konteks tulisan ini, ada landasan penting yang dapat penulis ambil dari Gramsci, yakni gagasannya tentang akademisi. Bagi Gramsci arti

²⁰ Baca dalam Takashi Shiraishi, "Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Sorjaningrat: Impian Mereka Masih Bersama Kita," dalam *1000 Tahun Nusantara*, ed. oleh J.B. Kristiadi (Jakarta: Kompas, 2000).

²¹ Edward W. Said, "Sebuah Pengantar," dalam *Peran Intelektual* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988).

²² Daniel Dhakidae, *loc.cit.*

²³ Julien Benda, *Pengkhianatan Kaum Cendekiawan*, trans. oleh Winarsih P. Arifin (Jakarta: Gramedia, 1997).

²⁴ Antonio Gramsci, *Sejarah dan Budaya* (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), hlm. 129.

akademisi sebagai sebuah kategori sosial tunggal yang bebas dari kelas adalah sebuah mitos. Namun sesungguhnya semua manusia punya potensi menjadi intelektual, sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki, dan dalam cara menggunakannya. Tetapi tidak semua orang adalah akademisi dalam fungsi sosial.

Karena itu menurut Benda, jika seorang cendekiawan menjadi mesin politik kekuasaan berarti ia telah melakukan pengkhianatan. Hal ini merupakan kesalahan yang tidak terampunkan dari seorang akademisi. Semestinya cendekiawan menjadi orang bijaksana penjaga moral (*moral oracle*) sekaligus menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan prinsip-prinsip moral. Kaum cendekiawan seharusnya mengambil jarak dengan proses-proses politik, bukannya menggunakan kemampuan intelektualnya untuk mendukung kubu politik tertentu.²⁵ Selanjutnya Edward W. Said, posisi intelektual dengan kekuasaan adalah intelektual sebagai pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar pada yang berkuasa. Artinya di sini meskipun pahit, pedas dan beresiko tinggi menyampaikan kebenaran itu tetaplah harus disampaikan pada penguasa.²⁶

Menurut Herbert Marcuse, kondisi ini menjadi sulit bagi semua elemen masyarakat, karena telah masuk dalam logika masyarakat satu-dimensi. Sebab, cara kerja masyarakat satu-dimensi yang sedang maju mengubah relasi antara yang rasional dan yang irasional.

Dibedakan dengan aspek-aspek yang fantastik dan gila dari irasionalitasnya, dunia irasional menjadi rumah bagi yang benar-benar rasional bagi gagasan-gagasan yang bisa mendukung seni hidup. Jika masyarakat yang sudah mapan mengusahakan semua komunikasi yang normal, memvalidasi atau meginvalidasinya menurut kebutuhan-kebutuhan sosial, maka nilai-nilai yang asing bagi kebutuhan-kebutuhan ini mungkin tidak memiliki medium komunikasi lainnya selain medium fiksi yang abnormal.²⁷

Posisi akademisi sebagai intelektual organik dicemaskan akan membangun struktur banalitas intelektual.²⁸ Banalitas mengingatkan kepada istilah Hannah Arendt yang ditulis dalam *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* untuk menyebut kejahatan yang telah kehilangan ciri jahatnya, dirasakan wajar/biasa saja. Banalitas kejahatan terjadi karena dangkalnya refleksi manusia terhadap situasi kejahatan yang terjadi. Pemikiran kritis menjadi lenyap. Subyek pelaku kejahatan tidak bisa mengimajinasikan jika berada dalam posisi korban.²⁹ Banalitas intelektual ialah suatu kondisi yang ditandai dengan tiga hal, yaitu pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, merosotnya kualitas akademik, dan kualitas intelektual. Secara sederhana

²⁷ Herbert Marcuse, *Manusia Satu Dimensi* (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 355.

²⁸ Heru Nugroho, "Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual: Sebuah Refleksi Kritis Dari Dalam," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2012).

²⁹ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasinya* (Jakarta: Gramedia, 2010).

²⁵ Benda, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁶ Said, *op.cit.*, hlm. 1.

banalitas intelektual di universitas ditandai dengan pendangkalan yang tidak disadari disertai menurunnya kualitas akademik sekaligus merosotnya komitmen terhadap bidang ilmu yang digeluti oleh para akademisi. Kualitas akademik merujuk pada tingkat penguasaan ilmu yang menyediakan peralatan-peralatan kerja akademik sedang kualitas intelektual merujuk pada komitmen akademisi terhadap ilmu sebagai bidang pengabdian.³⁰ Pemaparan berikut sebagai ilustrasi. Saya seorang dosen fakultas A, merosotnya kualitas akademik ialah ketika saya tidak mampu menguasai teori-teori A yang menyediakan pisau analisis untuk memahami realitas kekinian. Merosotnya kualitas intelektual adalah jika saya hanya mengadakan penelitian atau menulis jurnal semata-mata untuk memenuhi persyaratan akademis. Proses yang demikian berjalan seperti sewajarnya sebab dosen-dosen lain juga melakukan hal itu, ditambah peraturan dari negara yang banyak memberi syarat administratif untuk kenaikan pangkat, yang memang harus dipenuhi.

Pengertian intelektual disadari memiliki arti yang sangat luas. Pengertian intelektual yang dimaksudkan oleh Heru Nugroho dibatasi pada kegiatan intelektual kampus yang aktivitasnya berada di perguruan tinggi.³¹ Indikator pertama ialah pengkhianatan akademik. Para akademisi lebih mementingkan nilai pragmatis daripada nilai-nilai ilmu pengetahuan. Akademisi yang seharusnya bertugas melakukan refleksi kritis atas nilai-nilai abstrak yang abadi, seperti kebenaran, keadilan, terjebak pada

kepentingan-kepentingan pragmatis untuk meningkatkan pendapatan. Dicontohkan, seorang dosen yang memiliki pekerjaan lain di luar kota sehingga membuat tidak punya cukup waktu lagi beraktivitas di kampus. Contoh lain, keberpihakan akademisi ketika menjadi staf ahli, staf khusus, atau konsultan dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), tidak berada pada kepentingan masyarakat luas tetapi pada kepentingan perusahaan yang memberinya pendapatan.³²

Indikator berikutnya adalah intelektual pamer. Tanda ini biasanya terjadi pada akademisi yang secara instan mendapat predikat ahli atau pakar karena tampil di acara-acara televisi. Akademisi dan komentar-komentarnya menjadi komoditas tontonan dari dunia *ci-luk-ba* (*peek a bow world*) buatan televisi. Siaran televisi juga sesungguhnya sangat diperlukan untuk menularkan gagasan-gagasan para ahli kepada seluruh masyarakat.³³ Kembali pada predikat ahli/pakar yang diberikan secara instan, komentar-komentar akademisi yang demikian hanya memeriahkan gemerisik dunia yang dibuat televisi tanpa memberi sumbangan yang berarti/berbobot bagi dunia pendidikan. Heru Nugroho menyebut dengan istilah fenomena klobotisme (seperti klobot, kertas pembungkus rokok yang diremas dan berbunyi kemresek, gemerisik). Akhirnya, kritik-kritik yang dilontarkan si akademisi lewat media hanya membuahkan keuntungan pribadi, misalnya diangkat menjadi menteri, wakil menteri, atau staf presiden. Akibat ini hanya memuaskan hasrat kuasa pragmatis (ekonomi-politik)

³⁰ Nugroho, *op.cit.*, hlm. 6.

³¹ *Ibid.*, hlm. 7.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 8-9.

si akademisi. Hasrat distansi dan diri otonom menjadi karakter si akademisi ketika membidik sasaran kritik menyebabkan kritik kehilangan daya emansipatorisnya untuk sungguh menyelesaikan masalah sosial masyarakat.³⁴

Indikator banalitas intelektual yang ketiga adalah kegiatan akademik yang involutif. Maksudnya adalah seminar, diskusi topikal terus bergulir tapi tidak memberi makna yang cukup berarti dalam dunia akademis. Situasi yang ternyata terjadi adalah *juxtapose*, para akademisi melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian namun tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain.³⁵ Sindrom formalisme yang menyerang proses kreatif akademisi juga turut menjadi sebab kegiatan akademik yang involutif. Heru Nugroho menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum menulis buku atau jurnal ilmiah hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna mengejar jabatan guru besar. Kualitas jadi terabaikan, ISBN atau ISSN tertera menjadi lebih penting. Jurnal ilmiah juga banyak di antaranya yang dibuat untuk kepentingan pragmatis kenaikan pangkat dan jabatan.³⁶

MENGHARAP IDEALITA

Kualitas hidup masyarakat dan akademisi merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang saling menentukan. Pada satu sisi, akademisi bisa mengarah ke mana derap langkah pembangunan harus ditapak. Sebaliknya, pada sisi yang lain, seorang akademisi

juga bisa ditentukan dan dibentuk oleh watak pembangunan di mana ia tinggal. Hubungan dialektis antara pembangunan dan akademisi juga nampak dalam hidup masyarakat Indonesia. Seperti ditulis oleh Dhakidae, sejak Orde Baru, keberadaan para akademisi di Indonesia selalu menjadi alat bagi modal dan kekuasaan.³⁷ Akademisi selalu menjadi instrumen untuk menggolkan dan melegitimasi modal dan kekuasaan. Para akademisi yang terjebak pada lingkaran setan modal dan kekuasaan seperti ini cenderung menulis dan melakukan proyek penelitian untuk menyenangkan kaum bermodal dan berkuasa, baik dalam bidang ekonomi, birokrasi maupun politik.

Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin kompleks, kita semua tidak bisa berharap banyak pada akademisi yang lebih mendewakan modal dan kekuasaan untuk pembangunan yang lebih berpihak kepada Rakyat banyak. Karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas masyarakat, maka salah satu hal mendesak yang harus dilakukan adalah membebaskan para akademisi dari lingkaran setan modal dan kekuasaan yang serakah. Kesadaran mendalam untuk terus memberikan arah dan pencerahan bagi seluruh bangsa ini, merupakan amanah abadi yang harus terus dipikul oleh akademisi yang lurus.

Akademisi harus mampu mewujudkan misi emansipatoris ilmu pengetahuan dengan meninggalkan menara gading ilmunya dan terlibat dalam pergulatan hidup konkret masyarakat sambil tetap bersikap ilmiah. Para akademisi yang terlibat dalam kekuasaan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁷ Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*.

harus menampakkan dirinya sebagai sungguh-sungguh cendekiawan yang tercerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang ingin menikmati segenggam kekuasaan. Meskipun sudah menjadi pemegang kekuasaan, fungsi melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat tetap harus dijalankan.

PENUTUP

Sekelumit uraian di atas menunjukkan bahwa *pertama*, akademisi, merupakan orang-orang yang menjalankan peranan tertentu dalam masyarakat, peranan yang meliputi tindakan-tindakan yang lebih ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan budaya daripada pertimbangan-pertimbangan sosial. Kedua, untuk dapat bertindak rasional, seorang akademisi memerlukan prasyarat otonomi. Ketiga, akademisi harus mampu mewujudkan misi emansipatoris ilmu pengetahuan untuk berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Harsja W. "Kaum Cendekiawan di Indonesia: Suatu Sketsa Sosiologi." Dalam *Cendekiawan dan Politik*, disunting oleh Wiratmo Soekito. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Belkhouja, Mustapha, dan Hyungseok (David) Yoon. "How does openness influence the impact of a scholar's research? An analysis of business scholars' citations over their careers." *Research Policy* 47, no. 10 (2018): 2037–47.
- Benda, Julien. *Pengkhianatan Kaum Cendekiawan*. Diterjemahkan oleh Winarsih P. Arifin. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Bourdieu, Pierre. *In the Other Word, Essays Toward a Reflective Society*. London: Polity Press, 1990.
- Bula, German Ulises, dan Sebastián Alejandro González. "Academia and the World Brain." *Kybernetes* 47, no. 9 (2018): 1821–35.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Dhakiri, Muh. Khanif. *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*. Jakarta: Pena, 2008.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Graham Francis Badley. "Why and How Academics Write." *Qualitative Inquiry*, 2018. <https://doi.org/10.1177/1077800418810722>.
- Gramsci, Antonio. *Sejarah dan Budaya*. Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000.
- Haas, Peter M. "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination." *International Organization* 46, no. 1 (1992): 1–35.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasinya*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hatsin, Abu. *(Kata Pengantar), Islam Humanisme; Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Healey, Patsy. "Knowledge Flows, Spatial Strategy Making, and the Roles of Academics." *Environment and*

- Planning C: Government and Policy* 26, no. 5 (2008): 861–881.
- Inanna. “Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 27–33.
- Kleden, Ignas. “Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan.” Dalam *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Rezim*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Marcuse, Herbert. *Manusia Satu Dimens*. Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Moedjiono, Imam. “Cendeklawan dan Kebebasan Akademik.” *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah* 5 (1999): 67–78.
- Nugroho, Heru. “Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual: Sebuah Refleksi Kritis Dari Dalam.” Pidato Perngukuhan Jabatan Guru Besar. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Nulhaqim, Soni Akhmad, R. Dudy Heryadi, Ramadhan Pancasilawan, dan Muhammad Fedryansyah. “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015.” *Social Work Jurnal* 6, no. 2 (2013): 154–272.
- Postman, Neil. *The End Of Education*. Diterjemahkan oleh Siti Farida. Yogyakarta: Jendela, 2009.
- Saepudin, Juju. “Revitalisasi Peran ICMI pada Era Reformasi.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 1 (2016): 189–202.
- Said, Edward W. “Sebuah Pengantar.” Dalam *Peran Intelektual*. Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Shiraishi, Takashi. “Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Sorjaningrat: Impian Mereka Masih Bersama Kita.” Dalam *1000 Tahun Nusantara*, disunting oleh J.B. Kristiadi. Jakarta: Kompas, 2000.
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.